

**DUKUNGAN ARAB SAUDI TERHADAP REZIM MESIR DALAM
TINDAKAN REPRISIF TERHADAP IKHWANUL MUSLIMIN (IM)
(Support to Egypt in Saudi Arabia Repressive Acts Against The Muslim
Brotherhood)**



Disusun Oleh :

AHMAD FERY ALGARIDHO

(20110510284)

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Kerangka Pemikiran	5
1. Teori Politik Luar Negeri.....	6
2. Konsep Kepentingan Nasional	7
D. Hipotesa.....	13
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Jenis Penelitian	14
G. Teknik Pengumpulan Data	14
H. Teknik Interpretasi Data	16
I. Jangkauan Penelitian	17
J. Sistematika Penelitian	17
BAB II: HALUAN POLITIK LUAR NEGERI ARAB SAUDI	19
A. Gambaran Umum Arab Saudi	19
1. Sejarah.....	19
2. Wilayah	29
3. Politik.....	30
a. Konstitusi	32

b. Sistim Peradilan	35
B. Politik Luar Negeri Arab Saudi	38
C. Sikap Awal Arab Saudi Terhadap IM	40
1. Sejarah Ikhwanul Muslimin	40
2. Sikap Awal Arab Saudi Terhadap Ikhwanul Muslimin	44
BAB III: SIKAP ARAB SAUDI PASKA ARAB SPRING.....	50
A. Arab Spring Di Timur Tengah	50
1. Sejarah Sebutan Arab Spring.....	51
2. Tunisia	53
3. Lybia.....	53
4. Yaman	55
5. Suriah	55
B. Tindakan Represif Mesir Terhadap Ikhwanul Muslimin.....	56
C. Dinamika Hubungan Arab Saudi dan Mesir.....	67
BAB IV: DUKUNGAN ARAB SAUDI TERHADAP MESIR.....	70
A. Tujuan Arab Saudi Memberikan Dukungan.....	70
1. Melindungi Identitas Fisik	71
2. Melindungi Identitas Poltik.....	75
3. Melindungi Identitas Kultural.....	79
B. Upaya Arab Saudi Dalam Memberikan Dukungan.....	81
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	88
A. Kesimpulan.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Arab Saudi merupakan negara kerajaan dan salah satu negara di Timur Tengah yang memiliki jumlah penduduk mayoritas umat beragama Islam. Negara ini dari awal terbentuk telah menerapkan hukum Islam sebagai hukum negara. Bahkan Arab Saudi merupakan negara tempat berkumpulnya seluruh Umat Islam setiap tahunnya, khususnya ketika bulan haji tiba. Arab Saudi telah dikuasai oleh Keluarga Saud sejak abad ke-12 Hijrah atau abad ke-18 Masehi.

Arab Saudi menjalin hubungan baik dengan pelbagai negara-negara Timur Tengah. Tidak hanya itu, Arab Saudi pun menjalin hubungan baik dengan organisasi Islam Ikhwanul Muslimin (IM). Sejarah membuktikan Kerajaan Saudi menampung beberapa pelarian IM dari Mesir ketika zaman pemerintahan presiden Naseer.¹ Hubungan baik Saudipun tidak hanya itu, seperti Abdullah Azzam dan Muhammad Qutb (adik Sayyid Qutb) yang dipekerjakan sebagai dosen di Universitas King Abdul Aziz.²

Meski demikian, sebenarnya Arab Saudi dan IM tak bisa memupus hubungan baik di antara keduanya. Pendiri IM ditengarai mengambil inspirasi dari salafisme dan Raja Abdul Aziz bin Saud. Bahkan, Ahmad Saati, ayah Hasan al-Banna, salah satu tokoh salafi yang sangat populer pada masanya. Hasan al-Banna

¹<http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/13/09/04/mst0c5-inilah-akar-konflik-arab-saudi-dan-ikhwanul-muslimin> (diakses pada tgl 26-maret-2015)

²<http://www.annah.com/read/2009/07/14/4993-mengenal-lebih-dekat-dr-abdullah-yusuf-azzam.html> (diakses pada tgl 26-maret-2015)

mempelajari Salafisme dari Muhibbuddin Khatib dan Rasyid Ridha. Sejak 1928, Hasan al-Banna membangun kemitraan dengan beberapa tokoh penting di Arab Saudi, hingga akhirnya tahun 1936 ia melaksanakan ibadah haji. Inilah awal perjumpaan al-Banna dengan Raja Abdul Aziz. Tidak ada sesuatu yang istimewa dalam pertemuan pertama karena Raja Abdul Aziz secara diplomatis menolak permintaan al-Banna untuk membuka cabang IM di Arab Saudi.

Namun, upaya IM membangun kemitraan dan mengambil hati Arab Saudi tak pernah pupus. Tahun 1945, saat Raja Abdul Aziz melakukan kunjungan ke Mesir, terlihat para aktivis IM menyambutnya dengan gegap gempita. IM menggunakan isu Palestina sebagai pintu masuk membangun aliansi dengan Arab Saudi. Hubungan baik antara IM dan Arab Saudi mulai terbangun pasca Hasan al-Banna. Pada era kepemimpinan Hasan Hudhaibi, Arab Saudi menjadi mediator ketegangan antara IM dan Gamal Abdul Nasser. Bahkan, pada tahun 1966, Raja Arab Saudi dan para ulama Arab Saudi mengirimkan surat kepada Nasser agar mengurungkan niat untuk menghukum mati Sayyed Qutb.

Namun dewasa ini terjadi gejolak di Timur Tengah yaitu negara-negara Timur Tengah mengalami transisi demokrasi. Pelbagai macam rezim yang berkuasa di negara-negara Timur Tengah satu persatu mulai runtuh. Rakyat Arab di negara-negara Timur Tengah menjerit, memberontak, melawan pemerintah yang telah berkuasa berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tak ada rasa takut mereka untuk menyatakan ketidaksetujuannya terhadap cara kepemimpinan rezim-rezim yang berkuasa. Segala sesuatu dilakukan demi menggulingkan kekuasaan yang saat itu berkuasa. Mulai dari demonstrasi, pemberontakan melawan pemerintah

hingga penjarahan dipelbagai tempat. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada negara-negara lemah, namun negara kuat seperti Mesir pun terkena imbasnya. Saat itu rezim yang paling kuat berkuasa di Mesir yaitu rezim Presiden Hosni Mubarak.

Presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa selama 30 tahun diturunkan secara paksa oleh rakyat Mesir. Terjadi unjuk rasa besar-besaran kala itu dalam penurunan Husni Mubarak. Setelah Husni Mubarak berhasil diturunkan, Mesir mengadakan pemilu yang adil untuk pertama kalinya pada tanggal 16 – 17 Juni 2012. Kandidat yang terpilih adalah Presiden Mursi dengan kemenangan telak 51.7%.³ Akan tetapi kepemimpinan Mursi tidaklah sekuat seperti rezim-rezim yang berkuasa sebelumnya seperti Gamal Abdel Nasser, Anwar El Sadat dan Hosni Mubarak, Mursi tumbang ketika kepemimpinannya tepat 1 tahun. Keruntuhan kekuasaan Mursi disebabkan adanya kudeta yang dilakukan oleh militer Mesir. Setelah keruntuhan Mursi, tidak perlu sulit untuk menebak pemimpin selanjutnya yang akan menggantikan Mursi. Militerlah yang menjadi pemimpin yang melanjutkan pemerintahan Presiden Mursi. Dengan militer menjadi penguasa, bukan berarti tidak mendapat penolakan dari rakyat Mesir. Rakyat Mesir dengan dipelopori Ikhwanul Muslimin melakukan penolakan terhadap kepemimpinan Junta Militer yaitu Presiden Abdul Fattah as-Sisi dengan cara unjuk rasa besar-besaran.

Jenderal as-Sisi melihat hal ini sebagai ancaman dalam pemerintahan yang baru saja ia menangkan. Dengan otoriternya Jenderal as-Sisi memerintahkan

³<http://www.islamicgeo.com/2012/06/dr-muhammad-mursi-dari-desa-ke-istana.html> (diakses pada tgl 26-maret-2015)

militer mesir untuk menghabisi Ikhwanul Muslimin. Terjadilah tindakan represif besar-besaran yang dilakukan militer mesir atas perintah Jendral as-Sisi. Sebuah kantor berita di mesir yaitu IHH Hidayatullah melaporkan bahwa Jum'at malam (26/7/2013) waktu setempat, militer mesir menyerang aksi damai jutaan pendukung presiden terkuadeta, Muhammad Mursi, di alun-alun Rabi'ah al-Adawiyah, Kairo, menewaskan 55 orang dan 1000 orang lebih luka-luka. Bahkan jumlah korban tewas semakin bertambah dari jam-ke jam, menurut laporan NGO internasional asal Turki.⁴

Tidak hanya itu, Al Jazerra pun melaporkan Ratusan pendukung Ikhwanul Muslimin diyakini tewas pada Agustus 2013 ketika pasukan menyerbu dua camp di Kairo. Dengan melihat data-data tersebut, tentunya sangatlah kejam dan anarkis pemerintahan yang dipimpin oleh Jenderal as-Sisi untuk menumpas Ikhwanul Muslimin yang kita ketahui bahwa Ikhwanul Muslimin merupakan umat Islam. Negara Muslim yang melihat hal ini tentu akan sangat menentang pembantaian yang dilakukan oleh Rezim Jenderal as-Sisi.

Namun berbeda yang dilakukan oleh Pemimpin Arab Saudi Raja Abdullah. Raja Abdullah meminta bangsa Arab untuk bersama melawan upaya mendestabilisasi Mesir. Raja Saudi tersebut pun mendukung kepemimpinan militer dan upaya militer yang membantai pendukung Presiden Mesir terguling Muhammad Mursi. "Kerajaan Saudi Arabia, rakyat dan pemerintahnya berdiri hari ini dengan saudara dari Mesir untuk melawan aksi terorisme," Hal tersebut disampaikan oleh pemimpin negara yang memiliki julukkan negara petro dollar

⁴<http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2013/07/29/5693/kammi-sumbar-minta-presiden-ri-kutuk-pembantaian-di-mesir.html> (diakses pada tgl 26-maret-2015)

dalam pernyataan resmi di stasiun televisi pada Jumat (16/8).⁵

Dari latar belakang seperti ini dapat dilihat bahwa Arab Saudi mendukung Mesir atas tindakan represif terhadap Ikhwanul Muslimin. Padahal dalam sejarahnya Ikhwanul Muslimin dan Arab Saudi memiliki hubungan baik yang berarti Arab Saudi seharusnya membantu Ikhwanul Muslimin ketika Mesir melakukan tindakan represif terhadap Ikhwanul Muslimin.

B. Rumusan Masalah

Dengan penjelasan latar belakang di atas penulis hendak mempertanyakan, “Mengapa Arab Saudi memberikan dukungan terhadap pemerintah Mesir dalam melakukan tindakan represif terhadap Ikhwanul Muslimin?”

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab pokok permasalahan di atas kita dapat menggunakan suatu teori dan konsep. Konsep adalah abstraksi yang mewakili objek, sifat suatu objek, atau suatu fenomena tertentu.⁶ Konsep juga melambangkan suatu gagasan. Menurut Hedriksen (1992), pengertian teori adalah suatu susunan hipotesis, konsep, dan prinsip pragmatis yang membentuk kerangka umum referensi untuk suatu bidang yang dipertanyakan. Menurut Kerlinger (1973), teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lainnya yang mengandung suatu pandangan sistimatis dari suatu fenomena. Adapun teori dan konsep yang digunakan penulis adalah:

⁵<http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/13/08/17/mrnzky-saudi-dan-tiga-negara-teluk-dukung-pembantaian-di-mesir> (diakses pada tgl 27-maret-2015)

⁶Mohtar Mas' oed, *Disiplin dan Metodologi Hubungan Internasional*, LP3S, Jakarta 1990, hal. 94.

1. Teori Politik Luar Negeri

Dalam bukunya Suffri Yusuf (1989:110) politik luar negeri memiliki pengertian yaitu politik untuk mencapai tujuan nasional dengan menggunakan segala kekuasaan dan kemampuan yang ada.⁷ Juga dalam bukunya Sumaryo Suryokusumo (1985:62) politik luar negeri merupakan salah satu sarana untuk mencapai kepentingan nasional dalam hubungan internasional.⁸ Berdasarkan penjelasan mengenai politik luar negeri dari ke dua buku tersebut dapat kita lihat suatu negara melakukan politik luar negeri untuk memenuhi kepentingan nasional negara tersebut. Kepentingan nasional dapat berupa kepentingan dalam bidang ekonomi, kebudayaan keamanan ataupun dapat berupa tindakan untuk melindungi prestise (kehormatan) suatu negara yang melakukan politik luar negeri.

Dinyatakan Suffri Yusuf (1989:116) bahwa dalam melaksanakan politik luar negeri, suatu negara harus mengantisipasi masalah yang mungkin muncul, maka yang harus dilakukan oleh suatu negara untuk menjaga kepentingan nasional dalam politik luar negerinya adalah pertama, kemampuan untuk mengenal dan menganalisis masalah-masalah penting dalam politik luar negeri. Kedua, kemampuan untuk menentukan tindakan yang harus diambil lebih dulu. Ketiga, kemampuan untuk menentukan alternatif-alternatif terhadap kebijakan yang telah dirumuskan. Keempat, kemampuan untuk mengkaitkan analisis-analisis kebijaksanaan dengan sumber-sumber utama (sumber daya manusia,

⁷Suffri Yusuf..*Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1989 hal. 110.

⁸Sumaryo Suryokusumo. *Politik Luar Negeri RI Dalam Menghadapi Perkembangan di Afrika*. Bandung : Alumni, 1985. hal. 62.

uang, dan sumber daya alam), agar sumber-sumber ini selalu tersedia dalam melaksanakan politik dan hubungan luar negeri.⁹

2. Konsep Kepentingan Nasional

Konsep Kepentingan Nasional ini memiliki definisi tujuan-tujuan yang dicapai oleh suatu bangsa/Negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional akan tetap dan sama diantara Negara/bangsa adalah keamanan (mencangkup keamanan hidup dan kebutuhan wilayah) serta sejahtera. Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional merupakan pilar utama dalam bagi politik luar negeri dan politik internasional yang realis.

Ada perbedaan pendapat yang sangat besar dalam studi hubungan internasional antara orang-orang yang merasa bahwa kepentingan nasional dapat dicapai secara obyektif dan rasional dengan orang-orang yang melihat definisi kepentingan nasional sebagai perjuangan antara pelbagai pandangan dan preferensi yang bersifat subjektif, yaitu suatu perjuangan dimana kepentingan nasional merupakan hasil atau akibat politik. Bagi orang-orang dari kelompok pertama mengidentifikasikan kepentingan adalah merupakan suatu ilmu, sementara bagi kelompok kedua hal itu adalah seni.¹⁰ Pelopor aliran yang pertama, yang biasanya dipandang sebagai orang-orang atau golongan terkemuka (elit), adalah Plato. Menurut Plato kepentingan negara – kota (yaitu kepentingan umum) yang bisa dicapai oleh seorang raja yang pemikirannya bersifat filosofis dan dibantu oleh penasihat terpelajar, obyektif, dan berpikiran adil. Individu-individu

⁹Sufri Yusuf. 1989. *Op.Cit* hal 112.

¹⁰Coulumbis, Theodore A & Wolfe, James H, *Pengantar Hubungan Internasional : Keadilan dan Power*, Putra A. Bardin, Bandung, 1999, hal. 107.

tersebut bisa membuat keputusan-keputusan yang baik dan bijaksana yang menyangkut kepentingan umum tanpa mempertimbangkan hasrat atau sifat baik pribadi serta ketahanan-ketahanan yang picik.¹¹

Dalam persaingan politik internasional, paling tidak terdapat dua negara atau lebih yang ikut terlibat dalam usaha merebut atau memperoleh kekuasaan atau *struggle of power*. Meskipun tidak semua negara memiliki tingkat keterlibatan yang sama dalam persaingan politik internasional, karena keterlibatan suatu negara dalam persaingan politik internasional, sangat bergantung pada kekuatan nasional yang dimilikinya. Kekuatan nasional terdiri dari beberapa unsur yaitu unsur geografi, unsur populasi, unsur sumber daya alam, unsur kemampuan industri, unsur kesiagaan militer, unsur karakter nasional, unsur moral nasional, unsur kualitas diplomasi, serta unsur kualitas pemerintahan. Berdasarkan unsur-unsur kekuatan nasional inilah, pemerintahan kemudian merumuskan kepentingan nasionalnya yang tercermin dalam pelaksanaan kebijakan politik luar negerinya. Kepentingan nasional merupakan suatu keseluruhan nilai yang hendak diperjuangkan atau dipertahankan dalam forum internasional. Oleh karena itu dikatakan bahwa kepentingan nasional merupakan kunci dalam politik luar negeri.

Dalam sistim internasional, pola interaksi antar negara umumnya dilandasi oleh adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang ingin dicapai oleh setiap negara. Atas dasar kepentingan nasional, maka suatu negara membentuk dan merumuskan kebutuhan luar negerinya dalam hal menentukan sikap dan

¹¹*Ibid*, hal. 108.

mengatur hubungannya dengan negara lain dalam sistim internasional. Pelbagai aspek kehidupan yang akan diwujudkan oleh setiap negara ini digabungkan dalam bentuk kepentingan nasional.

Salah satu hal yang paling penting dalam pembahasan tatanan hubungan internasional adalah bahwa suatu hubungan yang terjadi antar pelaku-pelaku atau aktor-aktor internasional, baik negara maupun individu atau lembaga yang mengatas namakan negara, senantiasa dilandasi atas pencapaian kepentingan nasional dari setiap negara. Adapun pelaksanaannya oleh pelaku ataupun aktor internasional lainnya dalam interaksinya diimplementasikan dengan pelbagai cara, seperti melalui konflik atau kerjasama. Dalam mewujudkan kepentingan nasional, suatu negara berusaha melindungi dan mempertahankan dirinya dari pihak lain yang dapat mengancam kelangsungan dan pemenuhan kebutuhan suatu negara. Hakekat kepentingan nasional menurut Frankel yaitu :¹² “sebagai keseluruhan nilai yang hendak ditegakkan oleh suatu bangsa. Kepentingan nasional dapat meluluskan aspirasi negara dan dapat dipola secara operasional dalam aplikasinya pada kebijakan-kebijakan yang aktual serta rencana yang dituju”.

Dari penjelasan diatas, memperlihatkan bahwa kepentingan nasional selalu sebagai hal utama dalam pengambilan keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara terhadap negara lain, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Berdasarkan kepentingan nasional inilah suatu negara merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan dalam hubungan negara lain. Kepentingan nasional merupakan proyeksi dari kebutuhan-kebutuhan dalam

¹²Soeprapto, R, *Hubungan Internasional : Sistim, Interaksi dan Prilaku*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 144.

negeri serta usaha-usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup suatu negara, baik kebutuhan ekonomi, politik, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan.

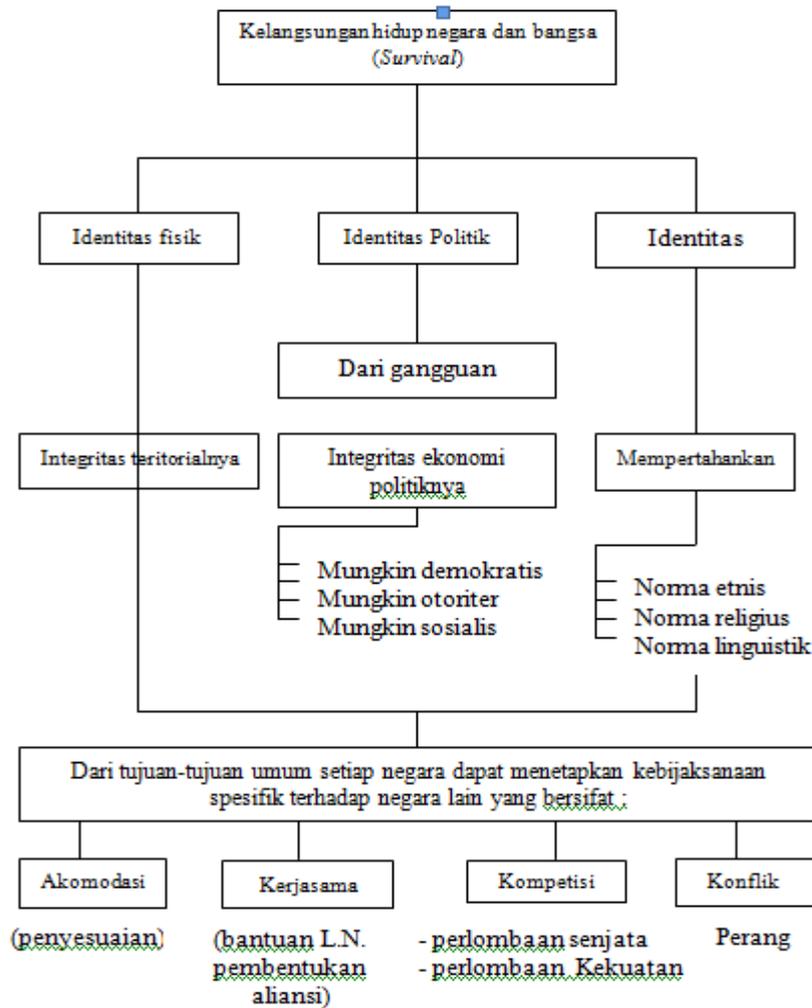
Dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya, suatu negara berusaha untuk melindungi dan mempertahankan diri dari pihak lain yang dapat mengancam kelangsungan dan pemenuhan kebutuhan negara. Plano dan Olton beragumen “Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup antar bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi”.¹³

Dari definisi diatas, menunjukkan bahwa kepentingan nasional senantiasa ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara terhadap negara lain, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Atas dasar kepentingan nasional inilah, suatu negara merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan ditempatkan dalam hubungannya dengan negara lain. Kepentingan nasional merupakan cerminan dari kebutuhan-kebutuhan dalam negeri serta upaya-upaya pemenuhan kebutuhan suatu negara, baik kebutuhan ekonomi, politik, sosial, dan budaya serta pertahanan keamanan.

Dibawah ini sebuah bagan yang menjelaskan tentang konsep Kepentingan nasional oleh Hans J. Morgenthau.¹⁴

¹³Jack C Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, Terjemahan Wawan Juanda, CV. Putra Abardin, Bandung, 1999, Hal. 7.

¹⁴ Glanville, Luke, *Who Are We To Think about the 'National Interest'?*, Australian Quarterly: 2005. hal 33-37.



Penjelasan bagan :

Dalam konsep kepentingan nasional adalah sebuah Negara akan melaksanakan sebuah tindakan demi mempertahankan kelangsungan hidupnya (*survival*). Dalam pandangan Morgenthau disini adalah setiap negara bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka Negara bangsa tersebut akan melindungi identitas fisik, politik, dan kulturalnya dari gangguan negara lain.

Pertama identitas fisik, Identitas fisik itu sendiri memiliki pengertian yaitu suatu tanda pengenal pada suatu Negara yang dapat diindra oleh panca indra

manusia. Identitas fisik ini dapat berupa daerah teritorial baik udara, darat maupun laut. Identitas fisik lebih menjurus kepada batas suatu Negara, batas antara Negara satu dengan Negara lainnya.

Kedua identitas politik, identitas politik itu sendiri memiliki pengertian yaitu bagaimana politik yang dijalankan oleh suatu Negara bangsa tersebut. Dimana suatu Negara bangsa akan dipandang di dunia Internasional dari bagaimana permainan politik yang diterapkan oleh Negara tersebut. Dengan adanya identitas politik yang dimiliki oleh Negara tersebut, maka Negara tersebut dapat menggunakannya sebagai tameng dimana akan digunakan sebagai perlindungan gangguan dari luar, juga digunakan sebagai dasar suatu Negara bangsa menerapkan sistim politiknya. Identitas Politik ini dapat berupa identitas sebagai Negara demokratis, otoriter ataupun sosialis.

Ketiga identitas kultural, identitas kulturak ini memiliki pengertian yaitu bagaimana kultur yang sudah ada di dalam wilayah Negara bangsa tersebut. Setiap Negara bangsa tentu memiliki kultur yang berbeda-beda, karena ada faktor sejarah yang mempengaruhi perbedaan kultur dari tiap-tiap Negara tersebut. Kultur inilah yang menjadi salah satu identitas Negara tersebut di mata dunia Internasional. Karena kultur suatu Negara tentu akan sangat mempengaruhi tindakan yang akan diambil oleh Negara tersebut. Beberapa identitas kultural dapat berupa norma etnis, religious dan linguitik.

Dari ketiga identitas tersebut, maka sebuah Negara akan dapat menentukan kemanakah arah tindakan yang dilakukan terhadap Negara lain. Tindakan yang akan dilakukan terhadap Negara lain tersebut dapat berupa sebuah akomodasi,

kerjasama baik militer maupun ekonomi, kompetisi baik kompetisi perlombaan senjata atau kekuatan dalam bidang lainnya juga Negara dapat mengambil langkah untuk konflik terhadap Negara lain. Semua itu dilakukan suatu Negara demi mempertahankan suatu yang sangat penting bagi setiap Negara yaitu bertahan hidup.

3. Pengaplikasian Teori

Dalam pengaplikasian Teori/Konsep, penulis berusaha mengkaitkan teori kepentingan nasional dan teori politik luar negeri yang terapkan oleh Raja Abdullah. Raja Abdullah dalam mendukung Jenderal as-Sisi merupakan salah satu strategi politik luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional dalam melindungi keluarga Saud. Tindakan yang dilakukan Raja Abdullah ini merupakan penerapan dari konsep kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau yaitu untuk bertahan hidup. Raja Abdullah mencoba mempertahankan suatu identitas fisik, politik maupun kultural dari dinasti keluarga saud yang selama ini menguasai Arab Saudi.

Dengan mendukung tindakan represif tersebut, maka Raja Abdullah berfikir dapat menekan pengaruh dari Ikhwanul Muslimin agar tidak menyebarkan pemikiran kepada rakyat Arab Saudi untuk merubah sistim pemerintahan Arab Saudi dari Monarki menjadi Demokrasi.

D. Hipotesa

Arab Saudi mendukung Mesir dalam tindakan represif terhadap Ikhwanul

Muslimin karena Arab Saudi ingin mempertahankan identitas fisik, identitas politik dan identitas kultural. Hal ini dilakukan Arab Saudi tidak lain demi mempertahankan hidupnya (*survival*).

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan antara lain :

1. Untuk menjelaskan sebab-sebab atau faktor-faktor atau kepentingan Arab Saudi dalam memberikan dukungannya terhadap rezim Mesir.
2. Memberikan gambaran keluarga Saud yang selama ini menguasai Arab Saudi.
3. Memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana S-1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian akademis. Penelitian ini hanya diperuntukkan mencari data yang relevan dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan yang digunakan untuk membuat skripsi sebagai syarat memperoleh gelar S-1.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, penulis hanya menggunakan Teknik Dokumentasi. Studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kantor, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Sedangkan menurut Sugiyono (2009) mengemukakan bahwa studi dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁵

Dalam melengkapi data dari tulisan ini, penulis menggunakan data sekunder yang kemudian diolah menjadi suatu kebenaran yang sesungguhnya. Data-data sekunder tersebut penulis dapatkan dari pelbagai macam buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi penulis. Penulis tidak hanya menggunakan buku sebagai sumber data, namun penulis juga menggunakan web, jurnal-jurnal ilmiah juga data-data yang penulis dapatkan dari dosen, tentunya web dan jurnal-jurnal tersebut berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan isinya. Penulis juga menggunakan berita luar negeri sebagai salah satu sumber untuk mengisi data dalam tulisan ini.

Kemudian setelah semua data terkumpul, data diolah sedemikian rupa dengan menggunakan kata-kata yang berasal dari penulis pribadi. Tujuannya adalah untuk menghindari tulisan plagiat. Setelah semua data tersebut diolah dengan kata-kata yang baik dan benar, penulis kemudian mengkaitkan dengan teori dan konsep yang digunakan oleh penulis. Tujuannya adalah agar tulisan tidak hanya membicarakan argumen semata, namun penulis menuliskan skripsi ini memiliki dasar yaitu teori dan konsep sebagai dasar utama tulisan ini.

¹⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung : Alfabeta 2011.

Penulis dalam membuat tulisan ini didampingi oleh dosen pembimbing. Dosen pembimbing ini bertugas memberikan arahan kepada penulis agar tulisan yang dibuat oleh penulis tidak keluar jalur, sehingga tulisan yang dihasilkan dapat lebih fokus dan lebih baik.

H. Tehnik Interpretasi Data

Dalam melakukan penelitian kualitatif ini, penulis terlebih dahulu melakukan analisis data. Analisis ini dilakukan pada data sekunder yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Penulis menggunakan tehnik analisis dari model Miles dan Huberman yaitu :¹⁶

Pertama Reduksi data, Reduksi Data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan tinggi. Jadi penulis berusaha berdiskusi dengan teman yang penulis pandang lebih memahami data-data yang digunakan oleh penulis sebagai bahan tulisan ini. Sehingga penulis dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. Dalam mereduksi data, penulis dipandu dengan tujuan yang akan dicapai. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah temuan. Jadi, ketika penulis melakukan pencarian data, menemukan segala sesuatu yang asing, yang belum dikenal akan penulis jadikan perhatian dalam mereduksi data.

Kedua Reduksi Data, Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya yang akan penulis lakukan adalah menyajikan data. Penulis akan menyajikan data dalam bentuk uraian singkat juga teks berbentuk narrative. Dengan menyajikan

¹⁶ Mile, M.B. dan Huberman, A.M , *Analisis Data Kuantitatif*, Penerjemah Tjetjep Rohendi, Jakarta: UI Press

data, akan mempermudah penulis dalam memahami apa yang terjadi juga mempermudah penulis untuk menentukan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami tersebut.

Ketiga Kesimpulan, Langkah ke tiga yang akan penulis lakukan adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

I. Jangkauan Penelitian

Untuk menjawab pokok permasalahan yang ada, maka penulis telah membatasi waktu penelitian yaitu pada saat awal diadakannya pemilu demokratis di Mesir pada tahun 2012. Dengan adanya pemilu tersebut, menandakan IM mampu menggulingkan rezim Husni Mubarak dan mendengungkan demokrasi kepada rakyat Mesir. Pada saat itulah Arab Saudi mulai khawatir atas Ikhwanul Muslimin. Periode dibatasi agar penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak melebar kepada pokok permasalahan yang lain. Sehingga hasil dari penelitian dapat terfokus dengan judul yang telah dibuat oleh penulis.

J. Sistematika Penelitian

Bab pendahuluan merupakan ringkasan singkat dari keseluruhan bab yang ada. Di dalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berfikir, hipotesa, tujuan penelitian yang nantinya akan digunakan sebagai *frame of*

reference bagi penulis untuk menyusun bab selanjutnya, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua akan dipaparkan gambaran umum Arab Saudi dari awal dibentuk oleh keluarga saud yang meliputi sejarah awal keluarga saud terbentuk, mencangkup wilayah, politik, serta sistim pemerintahan Arab Saudi dan sikap awal Arab Saudi terhadap Ikhwanul Muslimin.

Bab ketiga akan dipaparkan bagaimana Arab Spring atau transisi demokrasi yang terjadi di Mesir dapat mempengaruhi sikap Arab Saudi terhadap IM dan mendukung tindakan represif yang dilakukan pemerintah Mesir terhadap IM.

Bab keempat merupakan pembuktian dari hipotesis yang telah penulis kemukakan di depan.

Bab kelima merupakan kesimpulan dari Bab I sampai Bab IV dan saran dari penulis.